

AWALI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Kesadaran Keselamatan Berkendara Masih Rendah

YOGYA (KR) - Kesadaran masyarakat terkait keselamatan berkendara dinilai masih rendah. Hal ini dilihat dari tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang dilakukan oleh pengendara setiap kali dilakukan penegakan hukum.

Kepala Seksi Pengendalian Operasi Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Yogya Ariyanto Agus Cahyono, mengungkapkan setiap kali digelar penegakan hukum terdapat puluhan pelanggar yang terjaring.

"Sepanjang tahun 2024 lalu, dalam satu jam operasi gabungan ada sekitar 20 hingga 30 pelanggar yang dijaring. Itu baru satu jam, bagaimana jika sehari. Artinya kesadaran pengendara terkait dengan keselamatan masih rendah," ungkapnya di sela Operasi Gabungan Penegakan UU 22/2009 tentang LLAJ di kawasan Jalan Veteran, Senin (10/2).

Operasi gabungan terse-

but melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Kepolisian, Polisi Militer, Balai Pusat Transportasi Darat dan penguji. Kegiatan itu juga mengawali penegakan hukum LLAJ tahun ini yang akan digelar selama empat hari berturut-turut di lokasi yang berbeda. Pada operasi gabungan kemarin, terdapat 25 pengendara yang terjaring. Masing-masing 19 pelanggar yang ditangani Dinas Perhubungan dan enam pelanggar diproses pihak kepolisian.

Ariyanto Agus Cahyono menambahkan pihaknya bersama kepolisian berbagi tugas dalam memberikan tilang bagi pelanggar. Dinas Perhubungan fokus pada

kendaraan yang tidak laik jalan atau uji KIR telah habis serta angkutan kelebihan muatan. Sedangkan pihak kepolisian pada kelengkapan surat-surat kendaraan dan alat kelengkapan yang diatur oleh undang-undang. "Rata-rata jenis pelanggaran yang kami tangani tadi ialah masa berlaku KIR yang sudah habis. Padahal sudah kita sosialisasikan jika uji KIR sejak tahun 2024 itu gratis secara nasional. Sehingga yang melanggar langsung kita proses tilang," imbuhnya.

Menurutnya, uji KIR kendaraan barang maupun angkutan orang tidak boleh disepelekan. Hal ini karena pengujian kondisi armada

secara rutin tersebut sangat berkaitan keselamatan berkendara. Terutama menyangkut status kelaikan jalan yang meliputi fungsi dari setiap komponen kendaraan mulai dari fungsi pengereman, lampu sorot maupun riting, klakson, kaca spion, kondisi mesin dan lainnya. Uji kelaikan kendaraan itu pun harus rutin dilakukan setahun dua kali atau setiap enam bulan. Dengan layanan yang sudah digratiskan serta pendaftaran yang semakin mudah, seharusnya tidak ada alasan bagi pengendara yang enggan melakukan uji KIR.

Oleh karena itu setiap pelanggar tidak ada toleransi dan langsung diberikan tilang. Dijadwalkan proses sidang di Kejaksaan Negeri akan digelar pada 27 Februari 2025 mendatang. Bagi pelanggar pun tidak harus datang secara lang-



KR-Ardhi Wahdan

Operasi gabungan terhadap angkutan penumpang dan angkutan barang di kawasan Jalan Veteran, kemarin.

sung melainkan bagi yang berhalangan akan diberikan nomor hotline. Dendanya bisa ditransfer kemudian surat kelengkapan kendaraan akan dikirimkan via pos.

"Ini sudah mendekati Ramadan sehingga operasi gabungan tentu akan diintensifkan. Setidaknya da-

lam sebulan ada kegiatan empat kali yang menyoar lokasi rawan seperti di Jalan Bantul, Jalan Imogiri dan kawasan perbatasan," tandasnya.

Sementara salah satu pengemudi warga Wiro-saban Umbulharjo, Hari Sudarman, mengaku dirinya belum bisa memper-

panjang uji KIR lantaran armadanya sempat mengalami kecelakaan dan butuh waktu berbulan-bulan untuk perbaikan. Sehingga begitu kendaraan sudah bisa dikeluarkan dari bengkel, dirinya lantas terjaring operasi gabungan. "Belum sempat mengurus (KIR) saja," katanya. **(Dhi)-d**

UNTUK MEMPERLUAS JARINGAN

PDAB Tirtatama DIY Diminta Gandeng Investor

YOGYA (KR) - Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama DIY berkeinginan memperluas jaringan cakupan penyediaan air bersih di area perkotaan. Berkaitan dengan hal itu

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi masukan agar PDAB Tirtatama DIY menggandeng investor untuk mewujudkan rencana perluasan tersebut. Keinginan untuk melakukan perluasan jaringan itu sebagai upaya menunjukkan perkembangan PDAB Tirtatama DIY.

"Saat dialog soal perluasan jaringan, masukkan yang paling mendasar dari Ngarsa Dalem adalah bagaimana memperluas jaringan, dengan tidak membebankan kepada pemerintah daerah. Caranya tentu adalah kerja sama dengan pihak lain," kata Sekda DIY Beny Suharsono usai mendampingi Gubernur DIY



KR-Riyana Ekawati

Sekda DIY Beny Suharsono memberikan keterangan kepada media se usai mendampingi Gubernur DIY.

saat bertemu dengan Direksi PDAB Tirtatama di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Senin (10/2).

Beny mengungkapkan, dengan adanya kerja sama investasi memperluas jaringan keinginan PDAB Tirtatama DIY untuk melakukan penyesuaian tarif juga bisa dilakukan karena ada perluasan layanan. Dengan penyesuaian tarif layanan, diharapkan perusahaan tidak akan terbebani.

Rencana perluasan jaring-

an layanan ini dibenarkan oleh Direktur Utama PDAB Tirtatama DIY Teddy Kustriyanto Widodo. Menurut Teddy, sampai saat ini, penyerapan terhadap layanan air bersih yang dilakukan oleh PDAB Tirtatama DIY sudah sebesar 48 persen untuk wilayah Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Sesuai arahan Gubernur DIY, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan serapan air pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dijalankan

oleh pihaknya tersebut.

"Tahun 2025, target kami penyerapan bisa menembus angka 50 persen. Kalau bisa lebih cepat diwujudkan, kenapa tidak. Caranya tentu dengan memperluas jaringan penyalurannya. Karena itu, kami akan berdiskusi lebih jauh dengan PDAM Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, kira-kira daerah mana lagi yang bisa lebih dikembangkan," jelasnya.

Sebagai informasi, PDAB Tirtatama DIY memiliki tujuan untuk melakukan operasional SPAM Regional Kartamantul dan pengelolaan air bersih untuk keperluan air minum kawasan industri dan lainnya di DIY. SPAM Regional Kartamantul dibangun untuk memenuhi air minum masyarakat di DIY saat ini dan waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk.

(Ria)-d

Jembatan Srandakan Lama Akan Dibongkar

YOGYA (KR) - Jembatan Srandakan lama yang mengalami kerusakan parah akibat ambrol beberapa tahun silam, sempat menyita perhatian sejumlah kalangan, termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY. Dinas PUP ESDM DIY sudah menyiapkan opsi untuk untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan infrastruktur lain yang ada di sekitar jembatan Srandakan yang ambrol. Yaitu dengan melakukan pembongkaran di Jembatan Srandakan lama.

"Demi menjaga keamanan serta keberlangsungan infrastruktur lain di sekitarnya terutama Jembatan Srandakan 2, kami akan melakukan pembongkaran di Jembatan Srandakan yang sudah ambrol. Karena kalau dibiarkan dan tidak segera ditangani kami khawatir bisa mempengaruhi keamanan di sekitarnya," kata Kepala Dinas PUP ESDM DIY Anna Rina Herbranti di Kompleks Kepatihan, Senin (10/2).

Anna mengatakan, keberadaan sisa struktur jembatan yang rusak dapat menimbulkan risiko serius. Terutama apabila di bagian yang telah ambrol terbawa arus sungai dan menghantam pilar Jembatan Srandakan 2. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mempengaruhi keberlangsungan infrastruktur atau keamanan, harus segera diambil langkah yang cepat dan tepat. Salah satu hal yang bisa menjadi opsi adalah dengan melakukan pembongkaran.

Karena pembongkaran dianggap sebagai langkah paling aman untuk mencegah potensi bencana yang lebih besar. Mengingat Jembatan Srandakan lama sebelumnya merupakan jalur vital yang menghubungkan Bantul dan Kulonrogo sebelum pembangunan Jembatan Srandakan 2. Tapi karena usia jembatan yang sudah tua serta tekanan dari faktor alam membuatnya semakin rentan terhadap kerusakan.

"Kami khawatir kalau tidak dilakukan pembongkaran, seandainya terkena arus lagi terus menabrak pilar Srandakan 2, kan malah bahaya untuk jembatan yang sekarang dipakai. Jadi dengan melakukan pembongkaran kami berharap bisa mencegah terjadinya hal itu," ungkapnya.

Lebih lanjut Anna menambahkan, dengan adanya Jembatan Srandakan 2 fungsi jembatan lama secara otomatis tergantikan. Dimana Jembatan Srandakan 2 yang tepat berada di sebelah selatannya sekarang sudah menjadi jalur utama penghubung antara Kabupaten Bantul dan Kulonprogo.

"Memang kewenangannya (Jembatan Srandakan) ada di Pemda DIY tapi itu kan sudah tidak dipakai lagi. Nanti akan kami bongkar saja, jadi yang ambrol tidak akan diperbaiki. Mengingat sudah ada Jembatan Srandakan 2 yang saat ini sudah digunakan," jelasnya. **(Ria)-d**

PASTIKAN TAK PENGARUHI LAYANAN PUBLIK Pemda Kaji Rencana Penerapan WFAS bagi ASN

YOGYA (KR) - Pemda DIY sedang melakukan pengkajian secara mendalam terkait rencana penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kajian tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah memperbolehkan aturan fleksibilitas kerja bagi ASN.

Rencana WFA bagi para ASN tersebut muncul sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Seandainya kebijakan tersebut nantinya diberlakukan Pemda DIY akan siap untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi DIY telah memiliki pengalaman dalam menerapkan bekerja di luar lingkungan kantor bagi ASN saat pandemi Covid-19

"Prinsipnya kami siap dan taat terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penghematan. Oleh karena itu, saat ini kami telah melakukan kajian tentang penghematan. Hasil kajian tersebut akan menunjukkan seberapa besar penghematan yang bisa dicapai," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan, Senin (10/2).

Diungkapkan, saat ini Pemda DIY masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan final terkait penerapan WFA. Kendati demikian seandainya, kebijakan itu diterapkan pihaknya memastikan setiap kebijakan yang diambil akan selalu mengedepankan efisiensi anggaran. Tentunya tanpa mengurangi kualitas

pelayanan publik di Pemda DIY.

Jadi seandainya WFA diterapkan, layanan publik harus tetap berjalan optimal. Misalnya, rumah sakit seperti RS Paru Respira dan RS Grhasia, serta dinas sosial yang menangani lansia dan layanan sosial, harus tetap beroperasi tanpa kendala.

"Meski mempertimbangkan efisiensi biaya operasional, seperti pengurangan penggunaan kendaraan dinas, listrik, dan langganan internet. Kami tegaskan penerapan WFA tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu Pemda DIY berencana mengatur jadwal kerja ASN secara rotasi. Model ini sebetulnya pernah diterapkan, jadi relatif tidak ada masalah," ungkap Beny.

Lebih lanjut ditambahkan, supaya nanti seandainya diterapkan WFA bisa dilaksanakan dengan baik perlu ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di DIY. Karena fleksibilitas kerja tidak bisa diterapkan seragam di semua wilayah, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan masyarakat.

"Seandainya WFA nanti diberlakukan, kami tetap membuka layanan publik hingga hari Sabtu. Tapi, ada satu kabupaten/kota yang memutuskan untuk libur di hari Sabtu. Tentu saja hal ini tidak bisa diterapkan secara seragam karena pelayanan masyarakat harus berjalan secara terkoordinasi di seluruh wilayah," terangnya. **(Ria)-d**

DETEKSI DINI KANKER SERVIKS

Tingkatkan Kesadaran, Pemeriksaan Gratis di Puskesmas

YOGYA (KR) - Kaum perempuan di Kota Yogya diimbau meningkatkan kesadarannya dalam melakukan deteksi dini kanker serviks maupun kanker payudara. Dinas Kesehatan Kota Yogya pun telah memfasilitasi pemeriksaan gratis di seluruh puskesmas.

Kepala Seksi Pengendalian Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Yogya Iva Kusdyarini, mengatakan masih banyak perempuan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (KB) namun juga belum rutin melakukan pemeriksaan kesehatan organ intim mereka. "Padahal deteksi dini dapat membantu mencegah risiko penyakit yang lebih serius," katanya, Senin (10/2).

Kanker serviks dan kanker payudara selama ini masih menjadi penyebab utama kematian pada perempuan di Indonesia. Hal ini mendorong Dinas Kesehatan Kota Yogya mengimbau kaum perempuan untuk memeriksakan kesehatan organ reproduksi mereka dengan melakukan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (Sadanis) di fasilitas kesehatan terdekat.

"Kami mengajak seluruh perempuan, terutama yang sudah menikah atau wanita usia subur (WUS) pada usia 30-50 tahun, untuk segera memanfaatkan layanan IVA dan Sadanis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan ini penting untuk mencegah kanker serviks dan payudara sejak dini," imbuh Iva.

Menurutnya, pemeriksaan IVA dan Sadanis sangat penting untuk dilakukan dan layanan ini tersedia di puskesmas secara gratis. Pemerintah ju-

ga berupaya meningkatkan akses dan edukasi bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi mereka melalui berbagai media seperti pod cast, media massa, media online serta edukasi langsung di wilayah oleh puskesmas dan kader kesehatan. Diharapkan dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi maka angka kasus kanker serviks dan payudara dapat ditekan, serta kesehatan perempuan di Kota Yogya semakin terjaga.

Iva juga mengajak bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan ini dapat langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat secara gratis.

Sementara itu, Bidan Puskesmas Mantrijeron Huriyah, mengungkapkan hingga saat ini pelayanan IVA dan Sadanis di tempatnya sebagian besar diikuti oleh peserta KB yang memang rutin mengganti KB-nya di fasilitas kesehatan. "Sampai saat ini kami telah melayani pasangan usia subur (PUS) sebanyak 2.499 pasangan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut sebagian besar hanya pengunjung KB. Belum ada yang secara mandiri memeriksakan IVA dan Sadanis secara mandiri padahal pelayanan ini gratis," terangnya.

Dirinya mengungkapkan, kasus kanker leher rahim seringkali terlambat ditangani karena tidak dideteksi secara dini. Sehingga, kasus penderita kanker leher rahim datang ke RS seringkali sudah dalam stadium lanjut. Ia berharap, perempuan pada kategori WUS, secara dini memeriksakan kesehatan reproduksinya secara berkala ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa terdeteksi secara dini dan kesehatan reproduksi selalu sehat. **(Dhi)-d**

Milad ke-56 SD Muhammadiyah Tegalrejo



KR-Juvintarto

Kasek SD Muhammadiyah Tegalrejo memotong tumpeng dan menyerahkan pada Kepala Dikpora Kota Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Prestasi dan fasilitas pendidikan SD Muhammadiyah Tegalrejo terus meningkat seiring dengan kepercayaan masyarakat. Pada Milad ke-56 tahun, saat ini pembangunan masjid dan aula serbaguna SD Muhammadiyah Tegalrejo telah mencapai 80 persen dan menjadi unggulan kebanggaan sekolah

"Sesuai semangat Milad ke-56 'Knitting Together to Achieve Success' atau Merajut Bersama untuk Meraih Kesuksesan, maka guru/karyawan, orangtua/wali siswa, stakeholder bersinergi memajukan sekolah," ungkap Kepala SD Muhammadiyah Tegalrejo Hadi Nuryanto SAG SPd MSI kepada KR, Minggu (9/2) pada puncak Milad ke-56 SD Muhammadiyah Tegalrejo Yogyakarta.

Dijelaskan, aula gedung pertemuan serbaguna ini bisa juga untuk kegiatan olahraga bulutangkis, sepak takraw kegiatan seni tari dan lainnya. "Dari RAB Rp 1,18 miliar bisa berhemat menjadi Rp 750 juta dan terserap Rp 725 juta, untuk finishing masih kurang Rp 70 juta optimis bisa terpenuhi," ungkap Hadi.

Acara puncak Milad dimulai pagi hari dengan jalan sehat yang dibuka Kasek bersama Ketua Panitia Pembangunan Masjid/Aula Drs H Aris Tobirin MSI dengan melepas merpati dilanjutkan kunjungan market day produk menarik dari siswa, serta cek kesehatan gratis untuk 100 peserta.

Dilanjutkan acara inti di aula dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta H Aris Madani SPdI, Kepala Dikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori MSI yang turut memberi sambutan, dilanjutkan pemotongan tumpeng, bakso pemberian sembako, beasiswa, hadiah pemenang lomba video dan ditutup penarikan undian aneka doorprize menarik. "Sepanjang 2024 SDM Tegalrejo meraih 43 tropi, prestasi kejuaraan agama dan OSN di tingkat kecamatan dan kota serta potensi meraih juara lomba-lomba OSN," pungkas Hadi. **(Vin)-d**